

PERUMUSAN

Rakortek IGT Tahap 1

Hotel Bidakara, 23 Februari 2017

UMUM

1. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Perpres No. 9/2016) ditujukan untuk penyediaan peta tematik yang berkualitas sebagai dasar dalam penyusunan tata ruang daerah. KSP merupakan inti dari UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial.
2. Pokja dan walidata memiliki posisi yang strategis dalam mendukung percepatan penyelesaian target kegiatan KSP.
3. Melalui KSP diharapkan dapat menyelesaikan konflik/tumpang tindih pemberian izin/pengelolaan wilayah.
4. Rencana Aksi (Renaksi) Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) mencakup 85 IGT. Target Renaksi tahun 2016 adalah 78 tema dengan wilayah prioritas Pulau Kalimantan; 63 tema telah terintegrasi dan 15 dalam proses integrasi.

Target penyelesaian Kebijakan Satu Peta dalam 4 (empat) tahun adalah :

2016 : Pulau Kalimantan

2017 : Pulau Sumatra dan Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara

2018 : Pulau Papua dan Maluku, Pulau Jawa

2019 : Perbaikan

5. Diantara IGT yang belum terintegrasi adalah peta RTRW wilayah Kalimantan, dimana ditemukan beberapa permasalahan; dari hasil review ditemukannya 24 Perda yang perlu direvisi.
6. Tahap awal penyelesaian peta RTRW akan dibenahi 3 peta tematik terlebih dahulu yaitu: peta administrasi, peta RTRW dan peta kawasan hutan.
7. Revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah membutuhkan waktu, sementara Peta Tata Ruang menjadi dasar pemberian ijin. Dalam hal peta tataruang masih memerlukan revisi maka sesuai dengan amanat Perpres 9/2016 hasil integrasi data KSP dapat menjadi dasar untuk pemberian ijin.
8. Kedepannya, BIG akan melakukan pemetaan dengan skala yang lebih besar (hingga 1 :5.000) sesuai tuntutan kebutuhan dalam pembangunan nasional.

9. Kebijakan Satu Peta hanya dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang didukung oleh (1). Dasar Regulasi, (2). Dorongan Pemerintah, (3). Komitmen Kuat K/L Walidata dan (4). Peran serta aktif Pemerintah Daerah.
10. Pelaksanaan renaksi di lokasi prioritas Sumatera dan Sulawesi sudah disiapkan oleh masing-masing K/L, terkait penambahan lokasi Bali Nusa Tenggara seluruh K/L meminta surat dari Kemenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Harian Kebijakan Satu Peta untuk pembahasan di Internal K/L. Setelah selesai pembahasan di tingkat masing-masing K/L atas penambahan lokasi selanjutnya akan dilakukan finalisasi bersama antara K/L, Sekretariat PSKP dan Kantor Staf Kepresidenan

Berbagi Pakai Data

1. Konsep Pemanfaatan Produk KSP dengan BIG sebagai koordinator dan K/L selaku Walidata IGT sebagai simpul jaringan ialah untuk mengintegrasikan aspek keruangan dalam pengambilan keputusan.
2. Implementasi berbagi pakai dalam program Percepatan Kebijakan Satu Peta menjadi bagian yang penting khususnya dalam menunjang lingkup atau tahapan sinkronisasi antar IGT. Payung besar berbagi pakai telah disusun skema nasionalnya berupa, skema Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dimana beberapa peraturan setingkat PP dan Perpres telah disusun.
3. Skema berbagi pakai menjadi jawaban untuk pertanyaan bagaimana memanfaatkan data tersebut antar K/L dan bagaimana perlindungan atas skema berbagi pakai tersebut. Implementasi skema JIGN pada tahap sangat awal (inisiasi) dalam lingkup entitas K/L (walidata) Perpres No. 9 tahun 2016; ini menjadi penting dan fundamental untuk ditetapkan dan disepakati. Penyajian atau sosialisasi ke entitas Program PKSP konsep berbagi pakai secara umum dapat berupa Model Terdistribusi di K/L atau Model Sentralisasi. Lingkup skema berbagi pakai data IGT K/L yang terintegrasi terbatas dalam lingkup berbagi pakai antar pemerintah (G to G).
4. Perlu dibuat Standar basisdata dan SNI untuk mendukung Pemetaan Tata Ruang.
5. Standarisasi Data IG Nasional dalam Berbagi Pakai harus memenuhi standar KUGI. Panduan tentang KUGI bisa diakses melalui website www.kugi.ina-sdi.or.id.
6. Perlu kehati-hatian dalam berbagi pakai data tata ruang, diharapkan ada teknologi yang mampu melakukan "lock" data.
7. Bappenas sudah mengembangkan Webgis perencanaan yang diharapkan dapat terintegrasi dengan JIGN.
8. Data hasil kegiatan 2016 diharapkan sudah bisa diakses melalui ina-geoportal.

9. Perlu disiapkan standar klasifikasi khusus untuk berbagi pakai terutama untuk tema wilayah pertahanan.
10. Protokol berbagi pakai diprioritaskan pada aspek kelembagaan dan standarisasi menjadi prioritas untuk segera dirumuskan.
11. BIG secara standard dan infrastruktur siap untuk mendukung berbagi pakai data, perlu dukungan K/L dan pemda dalam ahl sdm dan peraturan perundangan.

Review IGD

1. BIG sedang melakukan Reviu Peta RBI 1 : 50.000 untuk Sumatera dan Sulawesi berdasarkan masukan dari K/L sampai dengan 15 Maret 2017, dan dijadwalkan untuk didistribusikan kepada 18 K/L secara bertahap. Rencana penyerahan hasil updating peta RBI untuk wilayah Sumatera adalah 1 April dan untuk wilayah Pulau Sulawesi adalah 1 Mei.
2. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara tidak ada rencana updating Peta RBI.
3. Bappenas memerlukan data nama dan sebaran waduk dalam penyusunan peta RKP
4. Bappenas banyak menggunakan peta RBI, beberapa data seamless masih perlu dikaji kembali karena masih banyak ditemukan kesalahan khususnya untuk skala tertentu, seperti atribut yang masih kosong, jalan yang belum presisi, wilayah pemekaran baru yang belum ada batas wilayahnya.
5. K/L merespon positif dan tetap melaksanakan integrasi dengan prioritas pada mainland Sumatera dan Sulawesi dan tetap menunggu hasil review pada April dan Mei

Pelaporan

1. Terkait dengan updating peta RBI, usulan dari Kelompok IGT Potensi untuk Target Pencapaian B04 dan B06 belum melakukan proses integrasi untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi.

Penyelesaian target bisa dilakukan untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

2. Hasil identifikasi tema IGT wilayah prioritas Bali dan Nusa Tenggara akan segera disampaikan ke K/L
3. Kriteria penilaian untuk pencapaian target pada setiap tahapan pelaporan akan ditindaklanjuti dengan Kantor Staf Presiden.

Grand Design

1. Penyelesaian gap di 2016-2019 selain perlu dana yang besar juga dibutuhkan kekuatan SDM, --> salah satu terobosannya ialah menggandeng perguruan tinggi dalam mendukung percepatan KSP
2. Untuk mendukung Pengembangan NSPK dan basis data IGT akan dikembangkan standar untuk struktur data (KUGI, metadata)
3. Fokus tematik di tahun 2016 mengarah kepada peta tematik wilayah darat, kedepannya akan mengarah ke lokasi pesisir dan laut.
4. Percepatan KSP akan diarahkan ke pemetaan skala besar (1:5.000) dengan melibatkan pemetaan partisipatif, yang dibantu oleh dukungan dari masyarakat, K/L, pemerintah daerah, LSM, dll.
5. Pengembangan simpul jaringan IG di K/L dalam kerangka Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional perlu dikuatkan model dan mekanisme protokol berbagai pakai datanya.
6. Ultimate goal KSP membantu kita bertindak MENINGTEGRASIKAN ASPEK KERUANGAN DALAM RPJMN 2015-2019 dengan tujuan akhir menuju kesejahteraan rakyat.

Bahan Paparan dan Rumusan Rakortek IGT Tahap I Tahun 2017 dapat diunduh pada link berikut :

<http://bit.ly/Rakortek-I-2017>